

# IMPLEMENTASI MODEL DESA MIGRAN PRODUKTIF DI INDONESIA

Bambang Sudaryana<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cipasung

Email: [Sudaryana.b@gmail.com](mailto:Sudaryana.b@gmail.com)

## Abstrak:

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan model pengelolaan desa yang mendukung penghentian pengiriman tenaga kerja Indonesia yang tidak terdidik ke luar negeri baik yang illegal maupun ilegal dan untuk menentukan strategi peningkatan kesejahteraan purna migrant dalam menata kehidupannya serta strategi menata kelola desa yang penduduknya memiliki jiwa kewirausahaan. Studi ini diharapkan untuk menyelidiki bagaimana model pengelolaan desa ini dapat dijadikan digunakan oleh masyarakat desa untuk menata kehidupannya menjadi sejahtera. Gagasan ini muncul setelah menemukan bahwa praktik mengelola desa migrant tidak efektif. Masyarakat desa Purna migrant hanya pulang untuk membelanjakan hasil kerjanya untuk pola yang konsumtif, bukan untuk investasi atau berwirausaha. Eksperimen dilakukan 1 (satu) tahun pada tahun 2019, untuk menentukan dampak implementasi model Desa migrant produktif. Sampel penelitian dilakukan terdiri dari 80 purna Migrant di Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu.

**Kata Kunci:** Desa Migrant produktif, purna migrant, model

## Abstract:

The main objective of this research is to determine a village management model that supports the end of sending uneducated Indonesian workers abroad, both illegal and illegal, and to determine strategies for improving the welfare of post-migrants in managing their lives and strategies for managing villages where people have an entrepreneurial spirit. This study is expected to investigate how this village management model can be used by the village community to organize their lives to be prosperous. This idea emerged after finding that the practice of managing migrant villages was ineffective. The villagers of Purna migrant only come home to spend their work on a consumptive pattern, not for investment or entrepreneurship. The experiment was carried out 1 (one) year in 2019, to determine the impact of implementing the productive migrant village model. The research sample consisted of 80 retired migrants in Kenanga Village, Sindang District, Indramayu Regency.

**Keywords:** productive migrant village, retired migrant, model

## Pendahuluan

Faktor utama yang mendorong warga untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah masalah ekonomi dan terbatasnya lapangan kerja. "Faktor utama adalah ekonomi keluarga. Memang masih ada beberapa variabel lain yang ikut menjadi daya dorong masyarakat untuk mencari kerja ke luar negeri," Berkaitan dengan faktor utama yang menyebabkan animo masyarakat begitu tinggi untuk mencari kerja di luar negeri sebagai TKI, walaupun tidak melalui prosedur yang benar. Data menunjukkan, selama Januari-September 2018, Satgas TKI telah mencegah 343 calon TKI dari NTT untuk berangkat keluar negeri secara tidak prosedural. Selain faktor utama adalah ekonomi keluarga dan keterbatasan lapangan kerja, tetapi ada variabel lain yang ikut berperan dan menjadi daya dorong yang begitu kuat sehingga masyarakat merasa tertarik untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI. Variabel-variabel itu antara lain, karena ada iming-iming untuk mendapat uang dalam jumlah banyak setiap bulan, dan gaji mereka akan dibayar dengan menggunakan mata uang dolar. "Orang di desa yang tidak pernah melihat uang dalam jumlah banyak, dan mereka dijanjikan akan mendapat upah dari dolar inilah

yang membuat mereka tidak lagi berpikir soal resiko yang dihadapi selama bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja ilegal."

Menjadi seorang TKI di negara asing, kadang oleh sebagian orang dianggap sebagai profesi yang remeh. Padahal, pekerjaan para TKI itu sulitnya bukan main. Bayangkan, bertahan hidup di negara asing tanpa ada sanak keluarga yang ada di sana. Belum lagi saat menengok jasa para TKI, jangan lupa kalau mereka adalah penyumbang devisa terbesar Indonesia. Di balik semua itu, meskipun kadang disepelekan, ternyata menjadi TKI itu bisa dibbilang dekat dengan kekayaan. Mulai dari gaji berlimpah ruah, hingga bonus yang bikin langsung tajir. Bisa dibbilang menjadi TKI itu seperti "Auto Kaya". Bahkan para pegawai kantor pun bisa kalah gajinya dengan mereka.

Bukan lagi sebuah rahasia kalau menjadi seorang TKI atau TKW itu memang dekat dengan kekayaan. Itu bukan hal yang aneh, karena kalau dibandingkan dengan upah minimum yang ada di Indonesia, di luar negeri sangat jauh lebih tinggi. Bayangkan saja, upah minimum TKI di negara tetangga kita Malaysia saja sudah Rp 3,1 juta tiap bulan. Sedangkan di Taiwan, upah TKW di sana Rp 6,91 juta per bulan. Angka di kedua negara itu rupanya tidak ada apa-apanya dibanding di Inggris, pasalnya di sana mereka digaji sampai Rp 23 juta per bulannya. Dengan pendapatan sebesar itu sudah sekelas manager di Indonesia. Bukan hanya gaji yang berlimpah, namun ternyata para TKI yang ada di luar negeri juga punya bonus yang bikin dompet tidak muat. Seperti di ketahui, berbeda dengan Indonesia, ada kebijakan-kebijakan tersendiri dari beberapa negara dalam memberikan bonus pada buruh dan pegawai. Misalnya saja yang ada di Hong Kong, di sana akan ada bonus besar bagi mereka yang sudah bekerja lebih dari 8 tahun. Bayangkan saja, mereka akan mendapatkan 2/3 gaji pokok di kalikan dengan lama tahun mereka bekerja. Jika seandainya saja gaji mereka sekitar 4310 HKS, para TKI ini bisa membawa pulang sekitar Rp 39 juta. Itu sih gaji paling minim dengan skill yang pas-pasan, bisa dilihat sendiri kalau ternyata mereka sudah jadi TKI profesional, entah berapa bonus yang didapat, pulang-pulang bisa jadi jutawan.

Dapat dikatakan memang masalah rezeki, tidak ada yang tahu selain Tuhan. Rupanya hal itu pula yang terjadi pada beberapa kasus para TKI yang ada di luar negeri sana. Mulai dari mendapatkan warisan hingga dinikahi oleh majikannya, semua bisa saja terjadi. Alhasil bahkan sebelum mereka bekerja lama jadi TKI pun, bisa dibbilang kalau kehidupannya sudah berubah. Buktinya sudah sangat banyak dan terus terjadi setiap tahunnya. Namun demikian, keberuntungan tersebut tidak terjadi begitu saja. Tanpa usaha keras dan disiplinnya para TKI itu, mana mungkin para majikannya mau menafkahi atau memberi warisan kepadanya. Bisa dibbilang kalau semua dikembalikan pada diri sendiri. Dan itulah beberapa bukti kalau menjadi TKI bisa dibbilang cepat kayanya. Mungkin kadang pekerjaan mereka dianggap remeh, namun ternyata hasilnya bisa luar biasa. Namun demikian, kadang ada juga dari TKI ini yang bernasib miris, mulai dari ditipu hingga disiksa majikan. Terlepas dari semua itu, satu hal yang harus kita ingat adalah, bahwa merekalah pahlawan devisa Negara.

Mengingat tingginya risiko bekerja di luar negeri, tentu sangat penting bagi calon TKI untuk benar-benar mempersiapkan diri sebelum berangkat. Salah satu yang harus dipertimbangkan adalah alasan calon TKI sehingga ia harus berangkat ke luar negeri. Beberapa alasan yang sering terjadi, calon TKI berangkat mencari penghasilan yang akan dipakai untuk: (1) membayar hutang, (2) menyekolahkan anak, (3) investasi, dan (4) mencari pengalaman kerja. Permasalahannya adalah (1) tidak terdapatnya pusat layanan migrasi dimana orang atau warga desa yang hendak berangkat ke luar negeri mendapatkan pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan kerja, (2) belum adanya kegiatan yang terkait dengan usaha produktif untuk membantu pasangan dari TKI yang bekerja di luar negeri agar mereka ini memiliki keterampilan dan kemauan untuk membangun usaha-usaha produktif. (3) Belum ada kegiatan untuk menangani anak-anak TKI atau anak-anak buruh migran dalam bentuk *community parenting*. (4) tidak ada penguatan usaha produktif untuk jangka panjang sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa di kantong-kantong TKI, dan (5) belum adanya program perlindungan TKI.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1. Desa

Menurut *Undang-Undang* Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII

### 2.2. Desa Migran Produktif

Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota dengan persetujuan pemerintah desa dapat membentuk Desmigratif sesuai kebutuhan melalui koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Pembentukan Desmigratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan belanja pada masing-masing daerah. Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. Dalam pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menunjuk Petugas Desmigratif sebagai fasilitator. Penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif bertujuan untuk: mewujudkan terbentuknya Komunitas Pekerja Migran Indonesia produktif; memperluas kesempatan kerja melalui penumbuhkembangan usaha produktif dan peningkatan keterampilan masyarakat Desa Migran; mewujudkan basis data Pekerja Migran Indonesia di tingkat desa; meningkatkan peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan; dan mewujudkan masyarakat Desa Migran yang produktif dan keluarga Pekerja Migran Indonesia yang sejahtera. memberikan edukasi proses migrasi yang aman dan prosedural;

### 2.3. Kajian Penelitian Lainnya

Edi hardum, Prof. Dr. Ari Hernawan, SH, H.Hum (2018). Penguatan Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri Sebagai Penghasil Devisa, Tesis : mengemukakan bahwa satu alasan Indonesia harus bekerja sama dengan negara lain adalah Indonesia membutuhkan tenaga kerja dari negara lain dan Indonesia juga mengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) ke negara lain. Namun, sayang, sejak lama sampai saat ini TKI selalu mengalami masalah, seperti gaji tidak dibayar, dipukul bahkan diperkosa sejak mereka masih di tempat penampungan di Indonesia, tempat mereka bekerja di negara penempatan sampai mereka tiba di bandara kedatangan di Tanah Air. Semua itu terjadi karena minimnya perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri sebagai penghasil devisa. Untuk menghilangkan permasalahan seperti itu, pemerintah melakan penguatan perlindungan hukum terhadap TKI. Untuk mengetahui

sejauh mana penguatan perlindungan hukum itu, peneliti melakukan penelitian normatif-empiris yakni mengkaji dan menganalisa UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sebagai hasil revisi atas UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri; serta memantau dan menganalisa praktik yang dilakukan di lapangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, pertama, ketentuan penguatan perlindungan hukum terhadap TKI yang diatur dalam UU 18/2017 tentang PPMI sudah memadai dan progresif. Kedua, pelaksanaan di lapangan penguatan perlindungan hukum terhadap TKI seperti dibangun Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Desa Migran Produktif (Desmigratif) sudah berjalan dengan baik.

Dan selanjutnya, Tyas Retno Wulan<sup>\*)</sup>, Dalhar Shodiq, Wita Ramadhanti, dan Sri Wijayanti,(2015) *Perlindungan Buruh Migran Dari Hulu ke Hilir Melalui Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi): Studi di Desa Kuripan Wonosobo Jawa Tengah dan Desa Nyerot Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat*, Pusat Penelitian Gender, Anak dan Pelayanan Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jendral Soedirman, mengemukakan bahwa Tingginya jumlah Buruh Migran Indonesia (BMI) yang bekerja ke luar negeri, ternyata tidak diimbangi perlindungan yang memadai oleh negara. Pada tahun 2011-2016 berdasarkan data dari *Crisis Center BNP2TKI*, terdapat sedikitnya 27 ribu kasus yang menimpa BMI yang berada di berbagai negara. Berdasarkan hasil penelitian Ecosoc (2008), permasalahan yang dihadapi BMI di Negara tujuan, 80 persen sumbernya justru berasal dari desa. Desa sebenarnya memiliki peran yang sangat strategis untuk menjadi basis bermigrasi aman, karena desa adalah pintu keluar yang pertama bagi seorang calon BMI. Abainya pemerintah terhadap perlindungan BMI pada akhirnya justru melahirkan perlawanan-perlawanan yang konstruktif dari desa-desa untuk melindungi para warga mereka. Perlindungan terhadap BMI itu diwujudkan dalam desa peduli buruh migran (desbumi) yang diinisiasi beberapa desa, antara lain Desa Nyerot Lombok Nusa Tenggara Barat dan Desa Kuripan Wonosobo Jawa Tengah. Untuk itu penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dampak keberadaan Desbumi terhadap perlindungan BMI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan FGD terhadap kepala desa, pengurus desbumi serta tokoh masyarakat di Desa Kuripan Wonosobo Jawa Tengah dan desa Nyerot Lombok Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan desbumi mampu menjadi model perlindungan BMI dari hulu sampai hilir dan menjadikan negara hadir dalam perlindungan BMI. Kesimpulannya Desa memiliki peran yang strategis untuk melindungi BMI, karena desa adalah pintu keluar yang pertama seorang warga desa sebelum berangkat ke luar negeri. Ketidakhadiran negara dalam perlindungan BMI, memunculkan inisiatif lokal berupa Desbumi (Desa Peduli buruh Migran) yang melindungi warga desa dengan layanan data, informasi, pos pengaduan yang didukung payung hukum berupa peraturan desa (perdes), teknologi informasi berbasis website dan didukung anggaran desa. Kehadiran desbumi di Desa Nyerot Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dan Desa Kuripan Wonosobo telah mempersempit ruang gerak para calo yang selama ini menguasai pengetahuan tentang tahapan bekerja ke luar negeri dan desa mampu memastikan bahwa para warganya berangkat dengan prosedur yang benar dan mendapat perlindungan yang maksimal.

Kemudian, Yeni Nuraeni (2018) *Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Agroindustri Melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Dalam Rangka Perluasan Kesempatan Kerja* Jurnal Akuntansi Manajerial Publikasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis ISSN (E): 2502-6704 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Vol. 3, No. 1, Januari - Juni 2018: 42-53,

mengemukakan bahwa Tingginya minat masyarakat Indonesia untuk mencari peluang kesempatan kerja di luar negeri salah satunya disebabkan karena belum berkembangnya budaya wirausaha dikalangan masyarakat pedesaan walaupun potensi sumber sumberdaya alam khususnya sektor pertanian cukup berlimpah untuk pengembangan UMKM berbasis agroindustri. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memacu perkembangan UMKM di daerah kantong TKI adalah dengan program Desa Migran Produktif melalui kegiatan pengembangan usaha produktif dan pembentukan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi yang dimiliki daerah yang menjadi lokus program desmigratif untuk mengembangkan UMKM berbasis agroindustri. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui pengisian kuesioner dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan dari 111 desa yang diambil menjadi sampel, sebagian besar memiliki potensi sumberdaya alam yang berlimpah untuk mengembangkan UMKM berbasis agroindustri. Untuk keberhasilan program desmigratif diperlukan strategi untuk dapat mengintegrasikan program-program lintas Kementerian/Lembaga sesuai dengan program prioritas nasional. Optimalisasi keberadaan mitra lokal yang bersedia bekerjasama untuk mengsucceskan program desmigratif menjadi kunci keberhasilan pengembangan UMKM berbasis agroindustri di daerah-daerah kantong TKI.

Kesimpulannya: Untuk mengembangkan usaha agribisnis skala kecil perlu dibentuk koperasi. Tanpa koperasi tidak mungkin agribisnis kecil dapat berkembang. Koperasi inilah nantinya akan berhubungan dengan pengusaha besar (Bungaran Saragih, 2001b). Koperasi di pedesaan merupakan pilihan yang paling tepat. Koperasi merupakan salah satu jaminan pasar produk pertanian di pedesaan. Oleh karena itu petani harus mengutamakan produksi komoditi unggulan di daerahnya. Petani melakukan usahanya berdasarkan perjanjian dengan pihak koperasi sebagai penyedia dana. Lembaga perkreditan pada kegiatan agribisnis memegang peranan yang penting sebagai penyedia kredit kepada koperasi dan pengusaha. Kredit disalurkan melalui koperasi di pedesaan yang sudah mempunyai bentuk usaha agribisnis dan agroindustri. Koperasi mengajukan kredit untuk modal kerja bagi anggota (petani) dan modal kerja bagi koperasi itu sendiri (sebagai pelaku agroindustri). Sementara kredit kepada pengusaha bisa saja dalam bentuk pengembangan usaha (swalayan, toko, ekspor, penyediaan teknologi, dan lain sebagainya). Keterlibatan pihak pemerintah berkaitan dengan ketentuan dan peraturan yang saling menguntungkan pelaku agribisnis. Pembinaan diberikan kepada koperasi dan petani (Syahza, 2003).

Hal ini dipertegas oleh Kholifatul Munawaroh (2019) , Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Peran Pekerja Migran Indonesia(PMI) Dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur, Tesis Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, yang mengemukakan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sudah mengakhiri masa kontrak kerjanya, disebut PMI Purna. PMI purna yang telah kembali dari bekerja di luar negeri membawa remitansi yang sangat besar. Remitansi yang tidak dikelola dengan baik akan habis untuk keperluan konsumtif, sehingga dapat menyebabkan PMI purna yang sudah kembali dari bekerja di luar negeri untuk berangkat lagi menjadi PMI. Oleh sebab itu, PMI Purna perlu dibina dan diberdayakan dengan tujuan dapat memiliki penghasilan berkelanjutan, dengan demikian berpeluang untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekelilingnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini sudah ada program pemberdayaan PMI Purna, yaitu (1) Program Desa Migran produktif oleh Kementerian Ketenagakerjaan, (2) Program pemberdayaan PMI purna Emas oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Program ini sesungguhnya relatif bagus, namun program tersebut di Kabupaten Lampung Timur belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan masih adanya kendala seperti sumber daya manusia PMI purna yang masih

minim pengetahuan, sulitnya akses permodalan, pemasaran produk kewirausahaan yang belum maksimal dan kurangnya mitra lokal yang ikut terlibat dalam proses pemberdayaan. Hal tersebut menyebabkan perlunya dilakukan sebuah kesinergisan dalam membuat dan menerapkan model pemberdayaan, yang dapat menjadi sebuah model acuan pemberdayaan bagi daerah-daerah dengan kantong PMI purna untuk mendorong pencapaian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur. Dan kesimpulan penelitiannya adalah Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Peran Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur dapat penulis simpulkan bahwa selama proses pemberdayaan yang dilakukan oleh PMI purna di Kecamatan Way Jepara dan Kecamatan Purbolinggo sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi keberlangsungannya masih terkendala oleh faktor-faktor penghambat yang ada di dalam PMI purna itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tahapan pemberdayaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tahapan pemberdayaan pada PMI purna di Kecamatan Way Jepara masih mengalami kendala. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan dari Sumber daya manusia (SDM) tentang pentingnya melakukan pemberdayaan dengan memanfaatkan hasil remitansi serta tidak melibatkannya mitra lokal untuk ikut serta membantu dalam proses pemberdayaan.
2. Pelaksanaan tahapan pemberdayaan pada PMI purna di Kecamatan Purbolinggo sudah berjalan dengan baik, karena usaha produktif yang tumbuh sendiri dipelopori oleh PMI purna. Hal tersebut terjadi karena PMI purna 136 memiliki pemikiran untuk mengumpulkan modal usaha saat bekerja di luar negeri. Sehingga saat pulang ke tanah air modal tersebut dapat digunakan untuk membangun usaha mandiri.
3. Faktor pendukung yang ada pada pemberdayaan PMI purna di Kecamatan Way Jepara dan kecamatan Purbolinggo yaitu keduanya memiliki program pemberdayaan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Masing-masing daerah memiliki program yang tentunya dapat membantu peningkatan pemberdayaan untuk menciptakan PMI purna yang mandiri dalam mengembangkan potensi serta usaha produktif untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
4. Faktor penghambat yang ada pada pemberdayaan PMI purna di Kecamatan Way Jepara dan kecamatan Purbolinggo yaitu masih minimnya mitra lokal yang dapat memberikan akses sarana dan prasarana dalam menunjang pemberdayaan. Serta masih terdapat tumpang tindih pelatihan yang diberikan oleh pemangku kepentingan. Sehingga esensi dari isi pemberdayaan kurang maksimal di terima oleh masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Peneliti menganalisis pengaruh Kebijakan, Purna TKI, kewirausahaan, dan Koperasi Desa terhadap Model Desa Migran Produktif dimana Kebijakan, Purna TKI, kewirausahaan, dan Koperasi Desa variabel yang mempengaruhi, sedangkan Model Desa Migran Produktif merupakan variabel yang dipengaruhi. Penelitian ini dilakukan dengan cara survei kuesioner yang disebar di Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu selama waktu penelitian. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. populasi penelitian ini adalah 130 Orang purna TKI. Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Sebagian dan mewakili dalam batasan di atas merupakan dua kata kunci dan merujuk kepada semua ciri populasi dalam jumlah yang terbatas pada masing-masing karakteristiknya. Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin hasilnya ditetapkan sebanyak 98 orang.

Analisis data menggunakan Regresi berganda adalah pengembangan dari regresi linear sederhana, yaitu sama sama alat yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tak bebas. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh

variabel bebas (independent) yaitu: pengaruh Kebijakan (X1), Purna TKI (X2), Kewirausahaan (X3), dan Koperasi Desa (X4), variabel terikat (dependent) Model Desa Migran Produktif (Y). Adapun bentuk persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: Persamaan Umum:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \varepsilon$$

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Pada bagian ini dituliskan tentang pengumpulan data dan temuan yang telah didapatkan. Ditulis dengan Times New Roman, font 12, spasi 1,15, dan baris pertama menjorok 1cm, tanpa spasi antar paragraf. Tabel harus disisipkan di dalam teks. Teks harus ditempatkan di atas tabel "Tabel X". mencolok. Nama tabel harus dicetak miring. Gaya APA. Tidak ada garis vertikal dalam tabel, hanya 3 garis horizontal. Font 11 dalam tabel. Sebagai contoh, dapat dilihat Tabel 1.

**Tabel 1 Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,670	2,777		,601	,549
Kebijakan	,549	,110	,452	4,970	,000

Berdasarkan tabel 1 dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut :  $KP = 1,670 + 0,549 X_1 + 0,373 X_2$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan seperti berikut ini :

- Nilai Konstanta sebesar (1,670). Nilai konstanta tersebut menunjukkan nilai positif. Dapat diartikan apabila kebijakan dan Purna TKI diasumsikan tetap maka Model Desa Migran Produktif akan mengalami peningkatan sebesar 1,670.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel kebijakan menunjukkan nilai positif sebesar 0,549. Dapat diartikan bahwa jika Kebijakan ditingkatkan 1 maka Model Desa Migran Produktif akan meningkat sebesar 0,549.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel Purna TKI menunjukkan nilai positif sebesar 0,373. Dapat diartikan bahwa jika Purna TKI ditingkatkan 1 maka Model Desa Migran Produktif akan meningkat sebesar 0,373.

### Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)

Pengujian dengan menggunakan uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) yaitu untuk melihat besarnya pengaruh variabel kebijakan (X1), Purna TKI (X2) terhadap variabel terikat yaitu Model Desa Migran Produktif (Y) secara simultan pada Model Desa Migran Produktif. Dalam penelitian ini untuk mencari koefisien determinasi menggunakan nilai Adjusted R Square seperti pada tabel di bawah ini :

### Hasil Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 2. Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,647 <sup>a</sup>	,418	,406	2,621

Tabel 2 menunjukkan bahwa hubungan antara kebijakan ( $X_1$ ) dan Purna TKI ( $X_2$ ) terhadap Model Desa Migran Produktif ( $Y$ ) termasuk dalam kategori hubungan yang cukup berarti dengan nilai  $R = 0,647$ . Kemudian untuk melihat seberapa besar kontribusi kebijakan ( $X_1$ ) dan Purna TKI ( $X_2$ ) mempengaruhi Model Desa Migran Produktif ( $Y$ ), dapat dilihat dengan menggunakan rumus Koefisien Penentu (KP) yaitu  $KP = R \text{ Square} \times 100\% = 0.647 \times 100\% = 41,8\%$  artinya Kebijakan dan Purna TKI memberikan kontribusi terhadap Model Desa Migran Produktif sebesar 41,8% atau dapat disimpulkan bahwa Model Desa Migran Produktif dipengaruhi oleh kebijakan dan Purna TKI sebesar 41,8% sedangkan sisanya sebesar 58,2% dipengaruhi oleh faktor lain.

#### Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3. ANOVA<sup>b</sup>**

Mode		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	468,958	2	234,479	34,130	,000 <sup>a</sup>
	Residual	652,675	95	6,870		
	Total	1121,633	97			

Hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai F hitung adalah sebesar 34,130 lebih besar dari  $F_{\text{tabel}} = 3,09$  dengan hasil signifikansi sebesar 0.000. Jadi, jika dibandingkan maka  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$  yaitu  $34,130 > 3,09$ . sehingga disimpulkan bahwa kebijakan dan Purna TKI secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Model desa Migran Produktif

#### Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu :

**Tabel 4. Coefficients<sup>a</sup>**

Mode		Unstandardized	Standardized Coefficients		
1					

	Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	1,670	2,777		,601	,549
Kebijakan	,549	,110	,452	4,970	,000
Purna TKI	,373	,119	,286	3,149	,002

Berdasarkan tabel 4 hasil uji parsial dapat dijelaskan seperti berikut ini :

### 1. Uji Hipotesis 1

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung untuk variabel Kebijakan sebesar 4,970 dengan taraf signifikansi 0.000. Dengan menggunakan tabel t, diperoleh angka  $t_{tabel}$  sebesar 1.985, sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4,970 > 1,985$ ), maka Kebijakan mempengaruhi Model desa Migran Produktif secara parsial. Angka signifikansi kebijakan ( $X_1$ ) menunjukkan lebih kecil dari 0.05 (yaitu  $0.000 < 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang menyatakan bahwa variabel bebas yaitu kebijakan berpengaruh signifikan terhadap Model Desa Migran Produktif di Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu.

### 2. Uji Hipotesis 2

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung untuk variabel independensi sebesar 3,149 dengan taraf signifikansi 0.002. Dengan menggunakan tabel t, diperoleh angka  $t_{tabel}$  sebesar 1,985, sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,149 > 1,985$ ), maka Purna TKI mempengaruhi Model Desa Migran Produktif secara parsial. Angka signifikansi Purna TKI ( $X_2$ ) menunjukkan lebih kecil dari 0.05 (yaitu  $0.002 < 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang menyatakan bahwa variabel bebas yaitu Purna TKI berpengaruh signifikan terhadap Model Desa Migran Produktif pada Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa kebijakan mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap Model Desa Migran Produktif pada Desa Kenanga Kecamatan sindang Kabupaten Indramayu, dengan koefisien regresi sebesar 0,549 dan signifikansi 0,000. Hasil tersebut membuktikan bahwa Kebijakan sangat berpengaruh terhadap Model Desa Migran Produktif Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa purna TKI dituntut untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan atau keahlian bukan hanya dalam metode dan teknik berwirausaha, akan tetapi segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintah. Kebijakan yang diperlukan dalam proses pembentuksn model desa Migran Produktif tidak hanya meliputi proses permodelan, pemrosesn, dan implementasi kebijakan tetapi juga terhadap evaluasi dan monitoring

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Edi hardum, Prof. Dr. Ari Hernawan, SH, H.Hum (2018). Penguatan Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri Sebagai Penghasil Devisa, Tesis : mengemukakan bahwa satu alasan Indonesia harus bekerja sama dengan negara lain adalah Indonesia membutuhkan tenaga kerja dari negara lain dan Indonesia juga mengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) ke negara lain. Namun,

sayang, sejak lama sampai saat ini TKI selalu mengalami masalah, seperti gaji tidak dibayar, dipukul bahkan diperkosa sejak mereka masih di tempat penampungan di Indonesia, tempat mereka bekerja di negara penempatan sampai mereka tiba di bandara kedatangan di Tanah Air. Semua itu terjadi karena minimnya perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri sebagai penghasil devisa.

Dan selanjutnya, Tyas Retno Wulan<sup>\*)</sup>, Dalhar Shodiq, Wita Ramadhanti, dan Sri Wijayanti, (2015) *Perlindungan Buruh Migran Dari Hulu ke Hilir Melalui Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi): Studi di Desa Kuripan Wonosobo Jawa Tengah dan Desa Nyerot Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat*, Pusat Penelitian Gender, Anak dan Pelayanan Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jendral Soedirman, mengemukakan bahwa Tingginya jumlah Buruh Migran Indonesia (BMI) yang bekerja ke luar negeri, ternyata tidak diimbangi perlindungan yang memadai oleh negara. Kesimpulannya Desa memiliki peran yang strategis untuk melindungi BMI, karena desa adalah pintu keluar yang pertama seorang warga desa sebelum berangkat ke luar negeri. Ketidakhadiran negara dalam perlindungan BMI, memunculkan inisiatif lokal berupa Desbumi (Desa Peduli buruh Migran) yang melindungi warga desa dengan layanan data, informasi, pos pengaduan yang didukung payung hukum berupa peraturan desa (perdes), teknologi informasi berbasis website dan didukung anggaran desa. Kehadiran desbumi di Desa Nyerot Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dan Desa Kuripan Wonosobo telah mempersempit ruang gerak para calo yang selama ini menguasai pengetahuan tentang tahapan bekerja ke luar negeri dan desa mampu memastikan bahwa para warganya berangkat dengan prosedur yang benar dan mendapat perlindungan yang maksimal.

Kemudian, Yeni Nuraeni (2018) *Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Agroindustri Melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Dalam Rangka Perluasan Kesempatan Kerja* Jurnal Akuntansi Manajerial Publikasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis ISSN (E): 2502-6704 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Vol. 3, No. 1, Januari - Juni 2018: 42-53, mengemukakan bahwa Tingginya minat masyarakat Indonesia untuk mencari peluang kesempatan kerja di luar negeri salah satunya disebabkan karena belum berkembangnya budaya wirausaha dikalangan masyarakat pedesaan walaupun potensi sumber sumberdaya alam khususnya sektor pertanian cukup berlimpah untuk pengembangan UMKM berbasis agroindustri. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memacu perkembangan UMKM di daerah kantong TKI adalah dengan program Desa Migran Produktif melalui kegiatan pengembangan usaha produktif dan pembentukan koperasi.

Kesimpulannya : Untuk mengembangkan usaha agribisnis skala kecil perlu dibentuk koperasi. Tanpa koperasi tidak mungkin agribisnis kecil dapat berkembang. Koperasi inilah nantinya akan berhubungan dengan pengusaha besar (Bungaran Saragih, 2001b). Koperasi di pedesaan merupakan pilihan yang paling tepat. Koperasi merupakan salah satu jaminan pasar produk pertanian di pedesaan. Oleh karena itu petani harus mengutamakan produksi komoditi unggulan di daerahnya. Petani melakukan usahanya berdasarkan perjanjian dengan pihak koperasi sebagai penyedia dana. Lembaga perkreditan pada kegiatan agribisnis memegang peranan yang penting sebagai penyedia kredit kepada koperasi dan pengusaha. Kredit disalurkan melalui koperasi di pedesaan yang sudah mempunyai bentuk usaha agribisnis dan agroindustri. Koperasi mengajukan kredit untuk modal kerja bagi anggota (petani) dan modal kerja bagi koperasi itu sendiri (sebagai pelaku agroindustri). Sementara kredit kepada pengusaha bisa saja dalam bentuk pengembangan usaha (swalayan, toko, ekspor, penyediaan teknologi, dan lain sebagainya). Keterlibatan pihak pemerintah berkaitan

dengan ketentuan dan peraturan yang saling menguntungkan pelaku agribisnis. Pembinaan diberikan kepada koperasi dan petani (Syahza, 2003).

Hal ini dipertegas oleh Kholifatul Munawaroh (2019), Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Peran Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur, Tesis Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, yang mengemukakan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sudah mengakhiri masa kontrak kerjanya, disebut PMI Purna. PMI purna yang telah kembali dari bekerja di luar negeri membawa remitansi yang sangat besar. Remitansi yang tidak dikelola dengan baik akan habis untuk keperluan konsumtif, sehingga dapat menyebabkan PMI purna yang sudah kembali dari bekerja di luar negeri untuk berangkat lagi menjadi PMI. Oleh sebab itu, PMI Purna perlu dibina dan diberdayakan dengan tujuan dapat memiliki penghasilan berkelanjutan, dengan demikian berpeluang untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekelilingnya.

## **Simpulan dan Saran**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Model desa Migran Produktif pada Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, dengan koefisien regresi sebesar 0,549 dan signifikansi 0,000 ( $\text{sig} < 0,05$ ). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat implementasi kebijakan, maka semakin meningkat atau semakin baik Model desa Migran Produktif
2. Purna TKI berpengaruh positif dan signifikan terhadap Model Desa Migran Produktif di Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu. dengan koefisien regresi sebesar 0,373 dan signifikansi 0,002 ( $\text{sig} < 0,05$ ). Hal ini berarti semakin baik kemampuan Purna TKI dalam berwirausaha dan masuk pada koperasi desa maka semakin tinggi atau semakin baik Model Desa Migran Produktif.
3. Kebijakan dan purna TKI secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Model desa Migran Produktif di Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dengan  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$  yaitu  $34,130 > 3,09$ . Nilai R square sebesar 0,418 membuktikan bahwa kebijakandan purna TKI memberikan pengaruh positif terhadap Model Desa Migran Produktif sebesar 41,8% sedangkan sisanya 58,2% dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat implementasi kebijakan maka akan menghasilkan Model Desa Migran Produktif.

### **Daftar Pustaka**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Hardum, E., & Hernawan, A. (2018). *Penguatan Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri Sebagai Penghasil Devisa*. Tesis.
- Wulan, T.R., Shodiq, D., Ramadhanti, W., & Wijayanti, S. (2015). *Perlindungan Buruh Migran Dari Hulu ke Hilir Melalui Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi): Studi di Desa Kuripan Wonosobo Jawa Tengah dan Desa Nyerot Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat*.

- Nuraeni Y. (2018) Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Agroindustri Melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Dalam Rangka Perluasan Kesempatan Kerja Jurnal Akuntansi Manajerial Publikasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis ISSN (E): 2502-6704 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Vol. 3, No. 1, Januari - Juni 2018: 42-53.
- Munawaroh, K. (2019). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Peran Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur, Tesis Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Sudaryana, B. (2018). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. CV. Deepublish: Yogyakarta.
- Sudaryana, B. (2019). *Desa Migran Produktif*. CV. Deepublish: Yogyakarta.
- Sudaryana, B. (2019). *Model Desa Wisata Wirausaha*. CV. Deepublish: Yogyakarta.